



RANCANGAN AKHIR RENJA BPBD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/27.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 serta sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan BPBD Kabupaten Blitar dalam mendukung visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, serta memperkuat pelayanan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai selama Tahun Anggaran 2026. Penyusunannya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk semakin meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Blitar, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam penanggulangan bencana.

Blitar, 21 Agustus 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar



IVONG BERTTYANTO, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730518 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	10
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	56
BAB III	58
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	60
3.3 Program dan Kegiatan	62
BAB IV	78
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	78
BAB V	92
PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Blitar	12
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar	25
Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Blitar	36
Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Blitar.....	57
Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2026.....	61
Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Blitar	66
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program / Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memegang peranan strategis dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari berbagai tahapan perencanaan pembangunan daerah, mulai dari penjabaran visi, misi, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rancangan ini memuat secara rinci program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan yang selaras dengan tugas dan fungsi BPBD, dan dipadukan dengan prioritas yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Blitar tetap berpegang pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan peran BPBD sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, di Tahun 2026, BPBD Kabupaten Blitar akan melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah strategis penanggulangan bencana, dengan menerapkan pendekatan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan, sesuai dinamika lingkungan dan tantangan kebencanaan yang terus berkembang.

Fokus utama tetap diarahkan pada upaya pencegahan dan mitigasi risiko bencana di fase pra-bencana, penanganan cepat dan efektif pada fase tanggap darurat, serta pemulihan yang mendorong pembangunan pasca bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut akan dilakukan melalui perencanaan yang matang, penguatan sistem kelembagaan, tata kelola yang transparan, serta penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen ini juga sejalan dengan amanat RPJMN, yang menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait, yang harus dilakukan secara kolaboratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan tahun 2026 merupakan masa transisi, di mana pada tahun 2025 secara bersamaan tengah disusun RPJMD Tahun 2025–2029 yang berlandaskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030. Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 ini menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sekaligus menjadi landasan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Renstra 2025–2029. Selanjutnya, Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) untuk tahun 2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar didasarkan pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 terkait Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan Akhir Renja PD menjadi landasan penting dalam penyusunan dokumen anggaran daerah, karena seluruh program dan kegiatan yang tertuang di dalamnya akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, perencanaan yang disusun tidak hanya menggambarkan arah kebijakan pembangunan, tetapi juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 66, Tambahan Lembar Negara Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203);
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;
25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;
29. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk merumuskan secara komprehensif dokumen perencanaan tahunan yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan maupun subkegiatan BPBD tahun 2026.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rancangan akhir Renja PD adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan perencanaan;
- 2) pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) penganggaran dan evaluasi kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;
4. Tabel

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;
3. Tabel

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun komunikasi keduanya;
4. Tabel.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana program dan kegiatan sesuai dengan inputan Renja pada SIPD Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja ini menjadi instrumen penting dalam mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program, serta menilai kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD. Secara umum, pelaksanaan Renja tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana, meskipun pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan di lapangan. Beberapa kegiatan mampu mencapai target kinerja secara optimal, sementara sebagian lainnya menghadapi kendala yang memerlukan tindak lanjut dan perbaikan ke depan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.068.255.802,00 (dua belas milyar enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan dua rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.709.080.010,00 (Sebelas milyar lima tujuh ratus sembilan juta delapan puluh ribu sepuluh rupiah) atau sebesar 97,02%.

Pada tahun 2025 BPBD melaksanakan 2 (dua) program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.880.435.308,00 (Empat milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah) dan sampai dengan semester 1 terealisasi sebesar Rp. 2.023.557.435,00 (dua milyar dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 41,46 %.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja tahun sebelumnya memberikan gambaran mengenai kinerja BPBD Kabupaten Blitar dalam

menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Capaian yang telah diraih tidak hanya menunjukkan tingkat efektivitas implementasi program, tetapi juga menggambarkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Di sisi lain, berbagai tantangan dan kendala yang muncul selama proses pelaksanaan turut memberikan pelajaran penting dalam merumuskan strategi yang lebih adaptif dan responsif ke depannya.

Setiap program dan kegiatan yang dijalankan memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Oleh karena itu, pemetaan terhadap capaian kinerja tahun lalu menjadi langkah penting untuk mengukur konsistensi pelaksanaan Renja dengan arah kebijakan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra. Selain sebagai bentuk evaluasi, pemetaan ini juga menjadi titik tolak dalam menyusun proyeksi capaian tahun berjalan, terutama dalam memastikan bahwa program yang direncanakan tetap berada pada jalur pencapaian tujuan strategis.

Proses evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki perencanaan ke depan, terutama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana. Tabel di bawah ini memuat ringkasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan secara langsung dengan target kinerja dalam Renstra BPBD Kabupaten Blitar.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Blitar

Nama SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	10 dokumen	90%
1	05	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 dokumen	20 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	15 dokumen	45 dokumen	90%
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	19 orang/bulan	20 orang/bulan	20 orang/ bulan	100%	30 orang/bulan	30 orang/bulan	100%
1	05	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 laporan	638 dokumen	200 dokumen	200 dokumen	100%	200 dokumen	1.038 dokumen	100%
1	05	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	-	12 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan/ diklat/ bimtek/sosialisasi	100%	100%	0	0	0	0	100%	68%
1	05	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	4 orang	-	-	-	-	4 orang	26%
1	05	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	40 orang	-	-	-	-	40 orang	80%
1	05	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	22 orang	-	-	-	-	22 orang	100%
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 jenis	3 paket	4 paket	4 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 jenis	2 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4 jenis	4 paket	3 paket	3 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22 eksemplar	2 paket	2 paket	2 paket	100%	1 paket	2 paket	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	22 eksemplar	-	-	-	-	-	-	-
1	05	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	-	-	-	-	-	6 laporan	6 laporan	100%
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	590 laporan	260 laporan	340 laporan	100%	150 laporan	1.080 laporan	100%
1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	17 unit	-	-	-	-	17 unit	100%
1	05	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	-	11 unit	100%	40 unit	51 unit	100%
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	31 unit	31 unit	100%
1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 unit	34 unit	34 unit	34 unit	100%	16 unit	118 unit	95%
1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-	-	100%	1 unit	1 unit	100%
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase penyelesaian dokumen pasca bencana		100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1	05	03	2	01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	100%
1	05	03	2	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	874.378 orang	563.302 orang	874.378 orang	874.378 orang	100%	35 orang	874.378 orang	100%
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%
1	05	03	2	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 orang	328 orang	50 orang	100 orang	100%	1 kawasan	4 kawasan	100%
1	05	03	2	02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	365 laporan	365 laporan	365 laporan	365 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1	05	03	2	02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 unit	35 unit	1 unit	1 unit	100%	42 unit	78 unit	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2	02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	45 kawasan	41 kawasan	10 kawasan	23 kawasan	1000%	6 kawasan	70 kawasan	100%
1	05	03	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 orang	54 orang	-	-	-	-	54 orang	100%
1	05	03	2	02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	10 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	40%
1	05	03	2	02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 orang	410 orang	-	-	-	75 orang	485 orang	97%
1	05	03	2	02	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100%
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	03	2	03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	60 menit	172 orang	4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	100%
1	05	03	2	03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	96 kegiatan	598 orang	50 orang	441 orang	100%	10 orang	1.049 orang	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	05	03	2	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6 jenis	191 orang	50 orang	141 orang	100%	300 orang	632 orang	100%
1	05	03	2	03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	25 orang	11 laporan	2 dokumen	2 laporan	100%	1 laporan	14 laporan	100%
1	05	03	2	04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%
1	05	03	2	04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 dokumen	11 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	100%	1 kegiatan	16 dokumen	100%
1	05	03	2	04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	23 dokumen	5 dokumen	-	-	-	3 dokumen	8 dokumen	100%
1	05	03	2	04	02	Penguatan kelembagaan bencana	Jumlah koordinasi penguatan kelembagaan bencana	1 kegiatan							0%
1	05	03	2	04	03	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah MoU yang dihasilkan diantara aktor pentahelix	4 Mou							0%
1	05	03	2	04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 aplikasi		-	-	-	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan		-	-	-	-	-	0%
1	05	03	2	04	15	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas, pelaksanaan Renja Tahun 2024 secara umum telah berjalan sesuai target yang ditetapkan pada tahun berjalan. Namun, jika dilihat dari capaian terhadap target Renstra, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai target yang telah direncanakan hingga akhir periode Renstra.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar program dan sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 100%, dengan capaian hingga Tahun 2025 sebesar 90% dari target akhir Renstra. Administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, serta pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan seluruhnya telah terealisasi 100% pada tahun berjalan. Untuk pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan, capaian hingga 2025 berada pada angka 95% dari target akhir Renstra.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan capaian yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, baik target tahunan maupun target Renstra. Adapun capaian dimaksud antara lain sebagai berikut:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi mencapai 340 laporan dari target tahunan 260 laporan. Hingga tahun 2025, jumlah laporan yang dihasilkan mencapai 1.080 laporan.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi sampai dengan tahun 2025 mencapai 17 unit dari target Renstra 15 unit, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan.
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya, pada tahun 2024, kegiatan ini semula tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran. Namun, melalui penyesuaian pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), pengadaan dapat dilaksanakan. Hingga tahun 2025, jumlah realisasi diperkirakan mencapai 51 unit, melebihi target Renstra 5 unit.
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana, pada Sub kegiatan Kajian Risiko Bencana, telah tersusun 2 dokumen dari target Renstra 1 dokumen, sehingga melampaui capaian yang direncanakan.
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota melibatkan 100 orang dari target 50 orang.
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan terealisasi 23 kawasan dari target 10 kawasan pada tahun berjalan, dan hingga 2025 telah terbentuk 70 kawasan dari target Renstra 45 kawasan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target;
- Capaian kinerja program dan kegiatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target
 - Keterbatasan alokasi anggaran pada tahun berjalan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
 - Kondisi cuaca ekstrem atau bencana alam yang terjadi di luar prediksi, sehingga mengalihkan sumber daya dan fokus pelaksanaan kegiatan.

- Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pelaksana di lapangan.
- Perubahan kebijakan atau regulasi yang mempengaruhi pelaksanaan program.

b. Faktor Penyebab Terpenuhinya Target

- ✚ Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan terkoordinasi dengan baik.
- ✚ Dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan sesuai target.
- ✚ Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

c. Faktor Penyebab Melebihi Target

- ❖ Optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan yang melebihi output minimal yang direncanakan.
- ❖ Adanya tambahan anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang memungkinkan penambahan volume kegiatan.
- ❖ Tingginya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga sasaran kegiatan dapat diperluas.
- ❖ Efisiensi penggunaan sumber daya yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan lebih dari target awal.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; Capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun berjalan, baik yang tidak tercapai, terpenuhi, maupun melebihi target, memberikan sejumlah implikasi terhadap pencapaian target Program Renstra Perangkat Daerah (PD), antara lain:

a. Terhadap Target yang Tidak Tercapai

- Memerlukan penyesuaian strategi pelaksanaan dan prioritas kegiatan pada tahun berikutnya agar kesenjangan capaian dapat diminimalkan.
- Berpotensi mempengaruhi ketercapaian sasaran Renstra secara keseluruhan jika tidak dilakukan langkah perbaikan yang tepat.

- Membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.
- b. Terhadap Target yang Terpenuhi
 - ✓ Menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program sesuai indikator yang telah ditetapkan.
 - ✓ Menjadi dasar untuk mempertahankan kinerja pada tingkat yang optimal di tahun-tahun berikutnya.
 - c. Terhadap Target yang Melebihi Capaian
 - Memberikan peluang untuk percepatan pencapaian sasaran Renstra sebelum periode berakhir.
 - Menunjukkan adanya potensi sumber daya dan dukungan yang dapat dimaksimalkan pada program atau kegiatan lainnya.
 - Menjadi bukti bahwa mekanisme pelaksanaan program telah berjalan secara efisien dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program dan kegiatan, diperlukan langkah-langkah perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:
- a. Optimalisasi Perencanaan Kegiatan
 - ❖ Menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan potensi risiko dan kendala di lapangan.
 - ❖ Mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya ke dalam perencanaan tahunan.
 - ❖ Menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan dampak terhadap pencapaian target Renstra.
 - b. Penguatan Dukungan Anggaran
 - ✓ Mengusulkan tambahan anggaran untuk kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran Renstra.
 - ✓ Mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional sesuai kebutuhan dan skala prioritas.

- ✓ Memanfaatkan sumber pendanaan alternatif seperti CSR, bantuan pemerintah provinsi/pusat, atau hibah.

c. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi

- Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan lintas sektor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.
- Membangun mekanisme komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

d. Penyesuaian Strategi Pelaksanaan

- ✚ Melakukan penjadwalan ulang atau perubahan metode pelaksanaan apabila terjadi hambatan yang signifikan.
- ✚ Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mempercepat proses kerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selaras dengan jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana yang menjadi kewenangan BPBD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Blitar didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Blitar, serta mengacu pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Secara umum, BPBD Kabupaten Blitar telah mampu menjalankan perannya sebagai lembaga teknis daerah di bidang penanggulangan bencana. Jenis pelayanan dasar pada Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Permendagri 101 Tahun 2018, dan pelaksanaan program serta kegiatan juga telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Blitar.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kapasitas Daerah			0,58	0,67	0,69	0,71	0,65	-	0,69	0,71	
2	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			78	71	73	75	69,35	-	73	75	
3	Persentase Pemerintah Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana			7%	18,1%	-	-	16,9%	18,5%	-	-	Penyesuaian IKU Tahun 2026-2029
4	Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	Penyesuaian IKU Tahun 2026-2029
5	Rata – rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	Penyesuaian IKU Tahun 2026-2029
6.	Persentase kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	Penyesuaian IKU Tahun 2026-2029
7.	Persentase penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	Penyesuaian IKU Tahun 2026-2029
8.	Persentase tata kelola sistem penanggulangan bencana yang tersedia			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	Penyesuaian IKU Tahun 2026-2029
9.	Persentase layanan penanganan pra bencana		v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Persentase layanan penanganan tanggap darurat		v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Persentase layanan penanganan pasca bencana		v	80%	100%	-	-	100%	-	-	-	Penyesuaian IKK tahun 2026-2029
12.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		v	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	Penyesuaian IKK tahun 2026-2029
13.	Persentase layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	Penyesuaian IKK tahun 2026-2029

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Analisis
14	Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan			100%	100%	-	-	99%	100%	-	-	
15	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Persentase penyelesaian dokumen pasca bencana			100%	100%	-	-	100%	-	-	-	
19	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran			-	-	81%	82%	-	-	81%	82%	Penyesuaian indikator program Tahun 2026-2029
20	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan penanggulangan bencana			-	-	100%	100%					Penyesuaian indikator program Tahun 2026-2029

Berdasarkan Tabel 2.2, capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar pada periode 2024 hingga proyeksi 2027 menunjukkan tren yang umumnya positif. Sebagian besar indikator telah mencapai target dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar target Renstra dapat tercapai sepenuhnya.

➤ Indikator Tujuan

Indeks Kapasitas Daerah (IKD), pada tahun 2024, IKD tercapai sebesar 0,65 dari target 0,58 (112%). Tren positif ini diproyeksikan berlanjut pada tahun 2025 (0,67), 2026 (0,69), dan 2027 (0,71), yang seluruhnya berada di atas target tahunan. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi dalam memperkuat kemampuan daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana.

➤ Indikator Kinerja Utama

- Nilai SAKIP, tahun 2024 sebesar 69,35, masih di bawah target 78. Pada periode 2025-2027, capaian diharapkan terus meningkat hingga mendekati target yang telah ditetapkan. Penguatan manajemen kinerja, keterpaduan perencanaan, dan penyediaan bukti dukung yang valid menjadi langkah penting untuk mencapainya.
- Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sub-urusan bencana
Pada periode 2024-2025, pengukuran kinerja sub-urusan bencana menggunakan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut:
 1. Persentase pemerintah desa/kelurahan yang menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, capaian rata-rata 2024, 2025 di atas 95%, menunjukkan implementasi Desa Tangguh Bencana telah berjalan optimal.
 2. Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan, capaian 2024-2025 tercapai 100% sesuai target.
 3. Rata-rata kenaikan indeks pemulihan pasca bencana, capaian 2024-2025 telah memenuhi target

Mulai tahun 2026 hingga 2027, ketiga indikator tersebut akan disesuaikan untuk lebih mengukur kualitas layanan dan tata kelola penanggulangan bencana, menjadi:

1. Persentase kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, dengan target 100% pada tahun 2026 dan 2027. Proyeksi capaian diperkirakan mencapai 100% setiap tahun.
2. Persentase penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat, dengan target 100% pada tahun 2026 dan 2027. Proyeksi capaian diperkirakan mencapai 100% setiap tahun.
3. Persentase tata kelola sistem penanggulangan bencana yang tersedia, dengan target 100% pada tahun 2026 dan 2027. Proyeksi capaian diperkirakan mencapai 100% setiap tahun.

➤ Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka meningkatkan akurasi pengukuran kinerja dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan strategis penanggulangan bencana, dilakukan peninjauan terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan pada periode perencanaan. Melalui proses evaluasi, sebagian IKK diputuskan untuk tetap dipertahankan karena masih relevan dan mampu merepresentasikan kinerja secara optimal, sementara sebagian lainnya mengalami penyesuaian untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terintegrasi mengenai keberhasilan penanggulangan bencana.

a. IKK Eksisting:

- Persentase layanan penanganan pra bencana ditetapkan dengan target capaian sebesar 100% pada setiap tahun perencanaan. Pada periode 2024-2027, indikator ini diarahkan untuk selalu memenuhi target melalui optimalisasi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi di seluruh wilayah rawan bencana.
- Persentase layanan penanganan tanggap darurat, ditetapkan dengan target capaian sebesar 100% pada setiap tahun perencanaan. Pada periode 2024-2027, indikator ini diarahkan untuk selalu mencapai target melalui penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar.

b. IKK yang disesuaikan:

Pada tahun 2024-2025, digunakan dua indikator, yaitu Persentase layanan penanganan pasca bencana dan Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, keduanya ditargetkan 100% per tahun.

Mulai tahun 2026 hingga 2027, kedua indikator tersebut disatukan dan disesuaikan menjadi Persentase layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan target capaian tetap 100% setiap tahun, untuk mengukur kinerja secara lebih terpadu dan komprehensif.

➤ Indikator Program

Pada periode 2024-2025, pengukuran kinerja layanan penanggulangan bencana dilakukan melalui indikator:

- Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan
- Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Seluruh indikator tersebut ditargetkan pada capaian 100% per tahun. Berdasarkan realisasi 2024, ketiga indikator layanan kepada masyarakat (informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi) mampu dipenuhi sepenuhnya, mencerminkan konsistensi kualitas layanan di seluruh tahapan penanggulangan bencana. Layanan kesekretariatan juga tercapai optimal pada 2024, meskipun sempat berada di kisaran 99%. Mulai tahun 2026, terjadi penyesuaian indikator untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan pengukuran kinerja, yaitu:

- Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran yang berfungsi menilai kualitas pelayanan administratif internal dengan target 81-82%. Tahun 2026 diproyeksikan tercapai 81% sebagai baseline awal, dan meningkat

menjadi 82% pada 2027 seiring perbaikan sistem administrasi dan peningkatan layanan internal.

- Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan penanggulangan bencana (target 100%), yang menggantikan tiga indikator lama di atas dengan satu indikator terpadu yang mencakup keseluruhan tahapan penanggulangan bencana.

Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menyederhanakan indikator, menghindari tumpang tindih, dan memberikan gambaran kinerja yang lebih menyeluruh terhadap layanan yang diberikan BPBD.

➤ Indikator SPM

- Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, target 100% per tahun dengan capaian 100% pada 2024 dan proyeksi tetap 100% hingga 2027.
- Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Target 100% per tahun dengan capaian 100% pada 2024 dan proyeksi konsisten 100% hingga 2027.
- Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Target 100% per tahun dengan capaian 100% pada 2024 dan proyeksi stabil 100% hingga 2027.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;

Tingkat kinerja pelayanan PD pada periode 2024 dan 2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi, dengan sebagian besar indikator berada pada target maksimal 100%, termasuk indikator SPM seperti layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Konsistensi ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi antar-unit kerja.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal kritis yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- ♦ Ketahanan Sumber Daya, keberlanjutan capaian tinggi membutuhkan ketersediaan SDM, sarana, dan anggaran yang memadai, terutama menghadapi dinamika bencana yang tidak terduga.
 - ♦ Ketergantungan pada dukungan eksternal, dalam beberapa penanganan bencana, keberhasilan sangat bergantung pada dukungan dari pihak luar daerah.
 - ♦ Pemanfaatan Teknologi Informasi, pemanfaatan sistem informasi kebencanaan masih terbatas pada fungsi dasar, sehingga diperlukan inovasi dan integrasi yang lebih optimal untuk memperluas jangkauan layanan dan efektivitas koordinasi penanggulangan bencana.
 - ♦ Partisipasi Masyarakat, kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana masih bervariasi, terutama di wilayah dengan tingkat risiko tinggi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Blitar menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Hambatan dan tantangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Ketersediaan SDM, sarana, dan anggaran yang memadai menjadi faktor penting, terutama dalam menghadapi bencana yang bersifat mendadak dan tidak terduga.
- Beberapa kegiatan penanganan bencana masih memerlukan bantuan dari pihak luar daerah, baik berupa tenaga, logistik, maupun koordinasi lintas lembaga.
- Sistem informasi kebencanaan masih terbatas pada fungsi dasar, sehingga perlu inovasi dan integrasi lebih optimal untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat koordinasi antar instansi.
- Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana masih bervariasi, khususnya di wilayah risiko tinggi,

sehingga edukasi, simulasi, dan pemberdayaan komunitas perlu ditingkatkan.

➤ Development Goals);

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Berbagai pencapaian kinerja dan hambatan yang dihadapi BPBD Kabupaten Blitar memiliki dampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam hal peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Pelayanan penanggulangan bencana yang efektif mendukung target-target pembangunan daerah, termasuk keamanan, kesejahteraan, dan kualitas hidup warga, sehingga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program pemerintah daerah.

Secara nasional dan internasional, kinerja BPBD juga terkait dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan yang berkaitan dengan keselamatan, mitigasi risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Hambatan seperti keterbatasan SDM, sarana, integrasi sistem informasi, dan partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas layanan, sehingga berdampak pada pencapaian indikator SPM maupun target SDGs terkait bencana dan ketahanan komunitas. Dengan demikian, perbaikan kapasitas internal, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan target pembangunan nasional maupun internasional secara optimal.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdapat berbagai tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan.

Tantangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, kebutuhan akan sarana prasarana yang lengkap, serta keterbatasan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang masih bersifat dasar. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam

kesiapsiagaan bencana yang bervariasi menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan layanan dapat menjangkau seluruh wilayah rawan bencana.

Di sisi lain, terdapat *peluang* untuk meningkatkan efektivitas pelayanan melalui penguatan kapasitas internal BPBD, integrasi dan inovasi sistem informasi kebencanaan, serta kolaborasi lintas instansi dan sektor. Kesempatan untuk memperluas edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga membuka peluang bagi peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan komunitas, sekaligus mendukung pencapaian target SPM dan kontribusi terhadap SDGs terkait keselamatan dan pembangunan berkelanjutan.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis hambatan yang dihadapi BPBD Kabupaten Blitar, beberapa isu penting muncul yang perlu menjadi perhatian strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas:

- Penguatan Kapasitas SDM dan Sumber Daya: penambahan personel terlatih, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta penyediaan sarana dan anggaran yang memadai untuk menjamin keberlanjutan layanan penanggulangan bencana.
- Inovasi dan Integrasi Sistem Informasi Kebencanaan: pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antari instansi dan berbasis teknologi digital akan meningkatkan efektivitas koordinasi, pemantauan, dan respons bencana.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Edukasi, simulasi, dan pemberdayaan komunitas harus diperluas, terutama di wilayah rawan bencana, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat.
- Kolaborasi Lintas Sektor: perlu memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga kemanusiaan, dan mitra internasional untuk mendukung sumber daya tambahan, inovasi, dan efektivitas pelaksanaan program.

- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja: penetapan indikator yang jelas, pengumpulan data yang valid, serta evaluasi berkala akan memastikan target SPM, IKU, dan IKK tercapai secara optimal serta selaras dengan SDGs dan visi-misi kepala daerah.

Rekomendasi ini menjadi acuan strategis dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BPBD untuk tahun perencanaan, sekaligus memastikan pelayanan penanggulangan bencana semakin efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan usulan program dan kegiatan dalam Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan daerah. Proses ini meliputi identifikasi kesesuaian antara prioritas pembangunan, target kinerja Renstra, dan kebutuhan masyarakat berdasarkan data serta indikator pelayanan dasar dan strategis.

Dengan mengacu pada tema RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 *“Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif”* Prioritas pembangunan V yaitu *“Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kualitas Pelayanan Publik”* dengan fokus pembangunan *“Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana ”* BPBD Kabupaten Blitar memiliki tanggung jawab strategis untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Blitar pada Tahun 2026 diwujudkan melalui program Penanggulangan Bencana yang meliputi empat kegiatan utama, yakni: penyediaan layanan informasi rawan bencana, peningkatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelaksanaan layanan penyelamatan dan evakuasi korban, serta penguatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, BPBD Kabupaten Blitar menjalankan program rutin Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang mencakup kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi

keuangan perangkat daerah, Administrasi umum perangkat daerah, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, serta Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Blitar untuk Tahun 2026 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Blitar

Nama SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Kab.Blitar	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	4.900.966.855,00	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Kab.Blitar	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	81%	4.389.219.090,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100%	36.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang telah dikerjakan	100%	0,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 laporan	24.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 laporan	0,00	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 dokumen	12.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 dokumen	0,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.625.966.855,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.078.074.040,00	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.521.566.855,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.062.174.040,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 dokumen	86.400.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 dokumen	15.900.000,00	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.bitar	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	12 dokumen	18.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	0	0,00	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat /bimtek/ Sosialisasi	100%	150.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0,00	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab.Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 paket	50.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab.Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0,00	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	25.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	25.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	50.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran	100%	302.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran	100%	539.286.140,00	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	11.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	10.014.300,00	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	38.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	187.020.340,00	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	14.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	12.421.700,00	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	29.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.999.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	26.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0,00	
1.4.6	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	50.000.000,00	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 laporan	24.870.000,00	
1.4.7	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	134.000.000,00	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	299.960.000,00	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100%	350.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100%	72.272.000,00	
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	220.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0,00	
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	130.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit	72.272.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	739.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	443.131.224,00	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	41.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26.320.000,00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	38.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	24.260.000,00	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	660.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	392.551.224,00	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Blitar	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	100%	698.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Blitar	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	100%	256.455.686,00	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kab.Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	280.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kab.Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31 unit	146.415.686,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 unit	18.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	15.040.000,00	
1.7.3	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	250.000.000,00	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	50.000.000,00	
1.7.4	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150.000.000,00	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	45.000.000,00	
2	Program Penanggulangan Bencana	Kab.Blitar	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	3.410.000.000,00	Program Penanggulangan Bencana	Kab.Blitar	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan penanggulangan bencana	100%	1.101.586.300,00	
		Kab.Blitar	2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kab.Blitar	3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%							
		Kab.Blitar	4. Persentase penyelesaian dokumen pascabencana	100%							
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Persentase Jumlah desa/ Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	100%	300.000.000,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan informasi rawan bencana	100%	20.120.500,00	
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan	650 orang	300.000.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan	35 orang	20.120.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tempat Tinggalnya					Tempat Tinggalnya			
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Blitar	Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	1.740.000.000,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Blitar	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	580.514.700,00	
2.2.1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (perjenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 kegiatan	100.000.000,00	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (perjenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	0	0,00	
2.2.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab.Blitar	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 unit	95.000.000,00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab.Blitar	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	42 unit	101.142.000,00	
2.2.3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	50.000.000,00	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	75 orang	42.432.900,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2.4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab.Blitar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	15 keluarga	25.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab.Blitar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0,00	
2.2.5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10 kawasan	620.000.000,00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 kawasan	408.937.400,00	
2.2.6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 orang	50.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0	0,00	
2.2.7	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	300.000.000,00	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0	0,00	
2.2.8	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	100.000.000,00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	5.375.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2.9	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	300.000.000,00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	0,00	
2.2.10	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2 kawasan	100.000.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kawasan	22.627.000,00	
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Blitar	Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana	100%	920.000.000,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Blitar	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	420.951.100,00	
2.3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 dokumen	170.000.000,00	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	14.985.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 orang	100.000.000,00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 orang	15.000.000,00	
2.3.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	40 orang	20.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	0,00	
2.3.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 orang	520.000.000,00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 orang	174.966.100,00	
2.3.5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	4 laporan	110.000.000,00	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 laporan	216.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab.Blitar	Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	450.000.000,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab.Blitar	Persentase layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terselesaikan	100%	80.000.000,00	
2.4.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	0,00	
2.4.2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab.Blitar	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dokumen	50.000.000,00	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab.Blitar	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0	0,00	
2.4.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	50.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0,00	
2.4.5	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	20 orang	20.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	0,00	
2.4.6	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah	50 orang	30.000.000,00	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah	0	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)					Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)			
2.4.6	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	12 kegiatan	150.000.000,00	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	1 kegiatan	30.000.000,00	
2.4.7	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota	Kab.Blitar	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 laporan	10.000.000	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota	Kab.Blitar	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.4.8	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab.Blitar	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	90.000.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab.Blitar	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 dokumen	50.000.000,00	
JUMLAH					8.310.966.855,00	JUMLAH					5.490.805.390,00

Berdasarkan tabel diatas, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara Rancangan Awal RKPD BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2026 dengan hasil Analisis Kebutuhan yang disusun setelah melakukan penyesuaian terhadap kondisi lapangan, prioritas pembangunan, dan kapasitas sumber daya. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga hasil Analisis Kebutuhan difokuskan hanya pada program dan kegiatan yang bersifat prioritas, mendesak, serta memberikan manfaat langsung bagi peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana. Penyesuaian dilakukan dengan cara mengurangi atau menunda kegiatan yang kurang mendesak, mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada, serta memaksimalkan potensi dukungan dari pihak ketiga untuk kegiatan non-prioritas.

Secara keseluruhan, total pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 8.310.966.855,00, sementara hasil Analisis Kebutuhan menunjukkan nilai sebesar Rp 5.490.805.390,00. Selisih sebesar Rp 2.820.161.465,00 tersebut mencerminkan penyesuaian rencana anggaran agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah. Pendanaan difokuskan pada kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas, sedangkan sebagian kegiatan dialihkan pelaksanaannya ke waktu berbeda atau dibiayai melalui sumber lain di luar APBD. Langkah ini diambil agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Adapun poin-poin yang dapat disimpulkan dari perbandingan tersebut meliputi:

1. Kegiatan dengan penyesuaian/penurunan anggaran, berdasarkan hasil analisis RKPD, terdapat sejumlah sub kegiatan yang mengalami penurunan alokasi anggaran. Penyesuaian ini umumnya dilakukan pada komponen operasional, administrasi, dan kegiatan lapangan yang dianggap masih dapat dioptimalkan melalui efisiensi biaya, penggabungan agenda, atau pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia..

Adapun sub kegiatan yang mengalami penyesuaian tersebut meliputi:

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dari Rp86.400.000,00 menjadi Rp15.900.000,00.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari Rp11.000.000,00 menjadi Rp10.014.300,00.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari Rp14.000.000,00 menjadi Rp12.421.700,00.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari Rp29.000.000,00 menjadi Rp4.999.800,00.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dari Rp50.000.000,00 menjadi Rp24.870.000,00.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari Rp350.000.000,00 menjadi Rp72.272.000,00.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari Rp130.000.000,00 menjadi Rp72.272.000,00.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, dari Rp41.000.000,00 menjadi Rp26.320.000,00.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari Rp38.000.000,00 menjadi Rp24.260.000,00.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dari Rp660.000.000,00 menjadi Rp392.551.224,00.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari Rp280.000.000,00 menjadi Rp146.415.686,00.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari Rp18.000.000,00 menjadi Rp15.040.000,00.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari Rp250.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari Rp150.000.000,00 menjadi Rp45.000.000,00.
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), dari Rp300.000.000,00 menjadi Rp20.120.500,00.
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dari Rp1.740.000.000,00 menjadi Rp580.514.700,00.

- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, dari Rp50.000.000,00 menjadi Rp42.432.900,00.
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, dari Rp620.000.000,00 menjadi Rp408.937.400,00.
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, dari Rp100.000.000,00 menjadi Rp5.375.000,00.
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, dari Rp100.000.000,00 menjadi Rp22.627.000,00.
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, dari Rp170.000.000,00 menjadi Rp14.985.000,00.
- Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dari Rp100.000.000,00 menjadi Rp15.000.000,00.
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dari Rp520.000.000,00 menjadi Rp174.966.100,00.
- Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, dari Rp150.000.000,00 menjadi Rp30.000.000,00.
- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota, dari Rp90.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00.

2. Kegiatan yang anggarannya dimanfaatkan untuk prioritas lain, beberapa sub-kegiatan pada hasil analisis dialihkan pendanaannya untuk mendukung kegiatan yang memiliki tingkat prioritas lebih tinggi. Sebagian kegiatan ditunda pelaksanaannya, digabung dengan program sejenis, atau diatur ulang agar pendanaannya lebih efisien. Kegiatan tersebut antara lain:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya;
- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
- Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota;
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota;
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- Bimbingan Teknis Pasca bencana Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana lintas kabupaten/kota.

3. Kegiatan dengan kebutuhan anggaran lebih, walaupun secara keseluruhan alokasi anggaran mengalami penurunan, terdapat beberapa sub-kegiatan yang memerlukan anggarannya lebih. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan target hasil yang ingin dicapai, penambahan komponen kegiatan, atau penyesuaian mekanisme pelaksanaan, kegiatan tersebut antara lain:

- ✚ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, meningkat dari Rp2.521.566.855,00 menjadi Rp3.062.174.040,00, seiring adanya penambahan jumlah ASN.
 - ✚ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, meningkat dari Rp38.000.000,00 menjadi Rp187.020.340,00, disesuaikan dengan kebutuhan belanja operasional kantor.
 - ✚ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, meningkat dari Rp134.000.000,00 menjadi Rp299.960.000,00, menyesuaikan kebutuhan intensitas koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
 - ✚ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, meningkat dari Rp95.000.000,00 menjadi Rp101.142.000,00, disebabkan oleh penyesuaian jenis peralatan dan harga pengadaan sesuai kebutuhan lapangan.
 - ✚ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, meningkat dari Rp110.000.000,00 menjadi Rp216.000.000,00, disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan belanja berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.
4. Perubahan target sasaran kegiatan, berdasarkan hasil evaluasi terdapat sejumlah kegiatan yang mengalami perubahan target dalam pelaksanaannya, perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penambahan jumlah pegawai, penyesuaian jenis belanja, efisiensi penggunaan anggaran, perubahan kebutuhan lapangan, serta penyesuaian terhadap jenis dan spesifikasi belanja yang dibutuhkan. Rincian perubahan tersebut adalah sebagai berikut:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target penerima meningkat dari 20 orang/bulan menjadi 30 orang/bulan karena jumlah pegawai bertambah.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, target dari 12 paket menjadi 5 paket, menyesuaikan jenis belanja.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target meningkat dari 2 paket menjadi 5 paket karena penyesuaian jenis belanja.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target menurun dari 12 paket menjadi 1 paket menyesuaikan jenis belanja.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target meningkat dari 120 laporan menjadi 150 laporan karena menyesuaikan kebutuhan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan berbagai pihak terkait.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, target menurun dari 12 laporan menjadi 6 laporan menyesuaikan ketersediaan anggaran.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target meningkat dari 1 unit menjadi 40 unit, menyesuaikan jenis belanja yang dibutuhkan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, target menurun dari 34 unit menjadi 16 unit menyesuaikan anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target menurun dari 5 unit menjadi 1 unit karena penyesuaian anggaran.
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), target menurun dari 600 orang menjadi 35 orang karena penyesuaian anggaran.
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, target meningkat dari 10 unit menjadi 42 unit karena adanya perubahan jenis peralatan yang dibutuhkan.
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, target menurun dari 100 orang menjadi 75 orang karena penyesuaian anggaran.
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, target menurun dari 10 kawasan menjadi 6 kawasan karena keterbatasan anggaran.
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, target menurun dari 12 laporan menjadi 1 laporan karena jenisnya diringkas dan anggaran disesuaikan.

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, target menurun dari 2 kawasan menjadi 1 kawasan karena penyesuaian anggaran dan jumlah peserta kegiatan.
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, target menurun dari 4 dokumen menjadi 1 dokumen karena penyesuaian anggaran.
- Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, target menurun dari 50 orang menjadi 10 orang karena keterbatasan anggaran.
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, target meningkat dari 50 orang menjadi 300 orang karena penyesuaian jenis belanja yang dibutuhkan.
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dari target 4 laporan menjadi 1 laporan karena penyesuaian jenis kegiatan.
- Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota, target menurun dari 12 kegiatan menjadi 1 kegiatan karena keterbatasan anggaran.
- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota, target meningkat dari 1 dokumen menjadi 2 dokumen karena menyesuaikan jenis dokumen yang diperlukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh melalui rangkaian proses perencanaan partisipatif, meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, serta hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Setiap usulan yang diterima kemudian dipertimbangkan berdasarkan urgensinya serta kesesuaiannya dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD, usulan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Blitar

Nama SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penanggulangan Bencana/Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kawasan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk warga negara termasuk kelompok rentan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran yang difokuskan pada peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana sebagai upaya memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut diselaraskan dengan kebijakan nasional, RPJMD, Renstra, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar tahun 2026. Selanjutnya, prioritas kebijakan diarahkan pada penguatan upaya mitigasi secara intensif, peningkatan kesiapan seluruh sumber daya, serta optimalisasi penanganan darurat yang terkoordinasi, responsif, dan efektif.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan penanggulangan bencana tahun 2026 mengacu pada:

- Fokus pembangunan Kabupaten Blitar pada tahun 2026 diarahkan pada “peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana” sebagai upaya memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Fokus ini sepenuhnya sejalan dengan RPJPN 2025–2045, di mana visi Indonesia Emas 2045 dijabarkan melalui Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi yang menekankan pentingnya ketangguhan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Relevansi fokus tersebut semakin jelas melalui Indikator Ekonomi (IE) 17: Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, yang menjadi tolok ukur nasional untuk peningkatan kapasitas adaptasi dan penurunan tingkat risiko bencana.
- Dalam RENAS PB 2025–2029, peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana menjadi salah satu prioritas strategis nasional dalam upaya membangun ketangguhan bangsa menghadapi risiko bencana. Arah kebijakan yang ditetapkan mencakup beberapa aspek utama, yaitu: penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat, agar respons terhadap potensi ancaman bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Peningkatan kapasitas kelembagaan

dan pemerintah daerah, melalui penyediaan sumber daya manusia, sarana, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Penguatan regulasi dan tata kelola penanggulangan bencana, untuk memastikan pelaksanaan kesiapsiagaan berjalan sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam kesiapsiagaan, guna mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana.

Dengan arah kebijakan tersebut, RENAS PB secara eksplisit menempatkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan sebagai pilar penting dalam penanggulangan bencana, sehingga fokus pembangunan Kabupaten Blitar pada tahun 2026 sejalan dengan strategi nasional yang sedang diimplementasikan.

- Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), agenda peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana selaras dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas global, khususnya:
 - Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, kesiapsiagaan bencana berperan penting dalam memutus siklus kerentanan ekonomi masyarakat miskin yang sering menjadi kelompok paling terdampak bencana. Upaya pengurangan risiko bencana mendukung perlindungan aset dan sumber penghidupan masyarakat, sehingga kemiskinan ekstrem dapat ditekan.
 - Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, penekanan pada penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana secara langsung mendukung target membangun kota dan permukiman yang aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini termasuk perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta perlindungan kelompok rentan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
 - Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim, kesiapsiagaan bencana merupakan instrumen adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, atau bencana hidrometeorologi lainnya. Dengan meningkatkan kapasitas adaptasi, daerah

mampu menurunkan risiko dan meminimalkan kerugian akibat perubahan iklim secara berkelanjutan.

Melalui keterkaitan dengan ketiga tujuan SDGs tersebut, fokus pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2026 tentang “peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana” menunjukkan kontribusi nyata pada agenda pembangunan global yang menekankan ketangguhan, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada telaah terhadap kebijakan nasional serta visi dan misi Pemerintah Daerah, maka arah pembangunan Kabupaten Blitar di bidang penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029 menjadi dasar penting bagi penetapan tujuan pembangunan BPBD. Landasan tersebut memberikan arahan agar perencanaan pembangunan di bidang kebencanaan tidak hanya berorientasi pada penanganan bencana semata, tetapi juga pada penguatan kapasitas daerah dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Dengan demikian, keberadaan BPBD diharapkan mampu berperan aktif dalam menciptakan kondisi daerah yang lebih tangguh terhadap potensi ancaman bencana.

Tujuan pembangunan BPBD selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Blitar 2025–2029. Penyusunan tujuan ini mempertimbangkan isu-isu strategis yang muncul dari dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain kebutuhan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana penunjang, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Dengan memperhatikan isu-isu tersebut, perumusan tujuan dan sasaran diarahkan untuk memastikan tersedianya tata kelola penanggulangan bencana yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Blitar tahun 2026 disusun secara sistematis agar mampu menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dijalankan. Tujuan dan sasaran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai orientasi kerja, tetapi juga

sebagai indikator keberhasilan dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Rumusan tujuan dan sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	0,69
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73
	Meningkatnya kualitas Layanan penanggulangan bencana	Persentase Kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%
		Persentase penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat	100%
		Persentase tata kelola sistem penanggulangan bencana yang tersedia	100%

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Blitar difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup keseluruhan siklus bencana, yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

➤ Fase Pra bencana

Sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat serta wilayah rawan bencana.

Indikator Sasaran: Persentase kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan.

➤ Fase Tanggap Darurat

Sasaran pembangunan menekankan pada penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Indikator Sasaran: Persentase penanganan darurat bencana yang dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran.

➤ Fase Pasca bencana

Sasaran pembangunan diarahkan pada penguatan tata kelola sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

Indikator Sasaran: Persentase tata kelola sistem penanggulangan bencana yang tersedia dan berfungsi.

Dengan demikian, sasaran BPBD Kabupaten Blitar membentuk satu rangkaian siklus penanggulangan bencana yang saling terkait dan berkesinambungan, serta capaian kinerjanya dapat diukur melalui indikator sasaran yang telah ditetapkan.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;

Dalam merumuskan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar untuk tahun 2026, terdapat sejumlah faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan. Faktor-faktor ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan, selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah, serta berorientasi pada peningkatan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Adapun faktor-faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

- ❖ Arah Kebijakan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044 yaitu "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".
- ❖ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015–2030, terutama pada tujuan Tanpa Kemiskinan, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, serta Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

- ❖ Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Bencana menjadi landasan utama bagi BPBD Kabupaten Blitar dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2026. Amanat SPM tersebut menekankan pada tiga bentuk layanan pokok, yaitu penyediaan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Ketiga layanan ini wajib dilaksanakan sebagai standar perlindungan dasar bagi masyarakat di bidang penanggulangan bencana.
- ❖ Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, dengan mengacu pada Visi Kabupaten Blitar, yaitu "Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya,", dengan Misi atau Catur Dharma ke 4 (empat) yaitu "Menjamin Ketentraman, Ketertiban, Ketangguhan Bencana, kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan", dengan mendukung Tujuan "Terciptanya suasana kehidupan yang aman dan kondusif," dan Sasaran "Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah" melalui indikator Indeks Risiko Bencana.
- ❖ Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Blitar diarahkan pada strategi pengurangan beban masyarakat, sehingga setiap kegiatan tidak hanya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kelompok masyarakat rentan dan mendukung pengurangan kerentanan sosial-ekonomi.
- ❖ Tema RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026, "Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian yang Didukung Inovasi dan SDM Unggul yang Inklusif", dengan fokus pembangunan prioritas V, "Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kualitas Pelayanan Publik", diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana untuk memperkuat ketangguhan daerah sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

- ❖ Tujuan dan Sasaran Strategis yang tertuang pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar yaitu tujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana.
- ❖ Perumusan program dan kegiatan BPBD juga memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta masukan dari para pemangku kepentingan yang diperoleh melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga setiap kegiatan yang dirancang lebih relevan, tepat sasaran, dan sesuai dengan harapan komunitas serta prioritas daerah.
- ❖ Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BPBD tahun-tahun sebelumnya, yang menjadi dasar untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, memperkuat keberhasilan yang telah dicapai, dan menjamin keberlanjutan perencanaan program selanjutnya.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;

Untuk tahun 2026, BPBD Kabupaten Blitar merencanakan 2 program, yang meliputi 10 kegiatan dan 30 sub-kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp 5.490.805.390,00 (Lima milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tersebut.

Seluruh program dan kegiatan BPBD Kabupaten Blitar pada tahun 2026 didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD. Dana ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, penanganan darurat, hingga pasca bencana dengan tujuan memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi dan merespons potensi bencana secara efektif.

Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Blitar tahun 2026 mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana. Pelayanan informasi serta upaya pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi seluruh wilayah,

khususnya daerah rawan bencana. Penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana difokuskan pada wilayah yang terdampak. Pendekatan ini menjamin efektivitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah secara menyeluruh.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - Perbedaan Jenis Program/Kegiatan: Beberapa program dan kegiatan yang direncanakan berbeda dari rancangan awal RKPD, karena menyesuaikan kondisi nyata di lapangan, hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta temuan analisis yang menunjukkan perlunya program dan kegiatan yang lebih relevan dan berdampak bagi masyarakat.
 - Perbedaan Pagu Indikatif: Terjadi perubahan pada pagu indikatif seiring penyesuaian prioritas dan ketersediaan alokasi dana. Langkah ini memastikan pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mendukung pencapaian target program dan kegiatan.

Berikut disajikan tabel rencana program dan kegiatan BPBD Kabupaten Blitar tahun 2026:

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kab. Blitar		5.490.805.390,00	DAU			5.588.370.077,17
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kab. Blitar		5.490.805.390,00	DAU			5.588.370.077,17
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Blitar	81%	4.389.219.090,00	DAU		82%	4.601.974.473,66
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	Kab. Blitar	100%	-	-		100%	45.000.000,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	4 dokumen	-	-		3 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	5.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Blitar	-	-	-		4 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	15 laporan	-	-		10 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Blitar	-	-	-		1 data	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Blitar	-	-	-		2 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kecukupan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Blitar	100%	3.078.074.040,00	DAU		100%	2.838.384.436,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	30 orang/bulan	3.062.174.040,00	DAU		30 orang/bulan	2.813.384.436,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	200 dokumen	15.900.000,00	DAU		200 dokumen	15.000.000,00
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Blitar	-	-	-		12 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Blitar	-	-	-		1 laporan	5.000.000,00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Blitar	-	-	-		100%	15.000.000,00
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Blitar	-	-	-		2 Laporan	5.000.000,00
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Blitar	-	-	-		12 Laporan	5.000.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi	Kab. Blitar	-	-	-		100%	15.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kepegawaian Perangkat Daerah							
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	100%	539.286.140,00	DAU		100%	398.590.037,66
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	5 paket	10.014.300,00	DAU		12 Paket	5.000.000,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	5 paket	187.020.340,00	DAU		12 Paket	190.000.000,00
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Blitar	-	-	-		1 Paket	8.590.037,66
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	4 paket	12.421.700,00	DAU		1 Paket	5.000.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Blitar	1 pakt	4.999.800,00	DAU		1 Paket	5.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Blitar	6 laporan	24.870.000,00	DAU		12 Laporan	35.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	150 laporan	299.960.000,00	DAU		130 laporan	150.000.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Kab. Blitar	100%	72.272.000,00	DAU		100%	500.000.000,00
1	05	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan						1 unit	500.000.000,00
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Blitar	40 unit	72.272.000,00	DAU		-	-
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	100%	443.131.224,00	DAU		100%	690.000.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Blitar	12 laporan	26.320.000,00	DAU		12 Laporan	25.000.000,00
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	12 laporan	24.260.000,00	DAU		1 laporan	5.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	12 laporan	392.551.224,00	DAU		12 laporan	660.000.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase barang milik daerah penunjang urusan	Kab. Blitar	100%	256.455.686,00	DAU		100%	100.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Urusan Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah yang berfungsi baik							
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Blitar	31 unit	146.415.686,00	DAU		31 unit	100.000.000,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Blitar	16 unit	15.040.000,00	DAU		-	-
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Blitar	1 unit	50.000.000,00	DAU		-	-
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Blitar	1 unit	45.000.000,00	DAU		-	-
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan penanggulangan bencana	Kab. Blitar	100 %	1.101.586.300,00	DAU		100%	986.395.603,51
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Kab. Blitar	100%	20.120.500,00	DAU		100%	70.000.000,00
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	" Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh	Kab. Blitar	35 orang	20.120.500,00	DAU		874. 378 orang	70.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun"							
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Kab. Blitar	100%	580.514.700,00	DAU		100%	610.000.000,00
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Blitar	42 unit	101.142.000,00	DAU		30 unit	35.000.000,00
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	75 orang	42.432.900,00	DAU		50 orang	30.000.000,00
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Blitar	-	-	-		20 keluarga	15.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Blitar	6 kawasan	408.937.400,00	DAU		5 kawasan	400.000.000,00
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Blitar	-	-	-	-	1 dokumen	100.000.000,00
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Blitar	1 laporan	5.375.400,00	DAU		12 laporan	10.000.000,00
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Blitar	1 kawasan	22.627.000,00	DAU		1 kawasan	20.000.000,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan	Kab. Blitar	100%	420.951.100,00	DAU		100%	126.395.603,51

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kab. Blitar	-	-	-		1 Laporan	10.000.000,00
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Blitar	1 dokumen	14.985.000,00	DAU		3 Laporan	10.000.000,00,
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Blitar	10 orang	15.000.000,00	DAU		10 orang	10.000.000,00
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kab. Blitar-	-	-	-		20 orang	30.000.000,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Blitar	300 orang	174.966.100,00	DAU		20 orang	20.000.000,00
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan	Kab. Blitar	-	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu							
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	1 laporan	216.000.000,00	DAU		1 Laporan	36.395.603,51
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terselesaikan	Kab. Blitar	100%	80.000.000,00	DAU		100%	180.000.000,00
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	25.000.000,00
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	15.000.000,00
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	10.000.000,00
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	20.000.000,00
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan	Kab. Blitar	-	-	-		20 orang	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)							
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab. Blitar	1 kegiatan	30.000.000,00	DAU		1 kegiatan	20.000.000,00
1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang	Kab. Blitar	-	-	-		1 lembaga	10.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						telah terdaftar dan legal							
1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Kab. Blitar	-	-	-		1 laporan	10.000.000,00
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Blitar	-	-	-		1 dokumen	10.000.000,00
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun"	Kab. Blitar	2 dokumen	50.000.000,00	DAU		1 dokumen	10.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun sebagai panduan strategis dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di daerah. Penyusunan program ini didasarkan pada analisis kebutuhan serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah, sekaligus mengedepankan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bencana yang mungkin terjadi. Selanjutnya dipaparkan uraian program dan kegiatan yang telah dirancang beserta alokasi anggarannya, sehingga memberikan gambaran mengenai arah pelaksanaan rencana tersebut.

Jumlah program dan kegiatan untuk tahun Anggaran 2026 direncanakan sebanyak 2 program, 10 kegiatan serta 30 sub kegiatan. Dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/kegiatan sebesar Rp 5.490.805.390,00 (Lima milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Masing-masing program dan kegiatan memiliki indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, indikator kinerja Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran, target kinerja 81% dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.389.219.090,00 terdiri dari 6 kegiatan yaitu:
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang telah dikerjakan melalui 2 sub kegiatan dengan anggaran Rp.0 yaitu:
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen, yaitu Renja Perubahan Tahun 2026, Renja Tahun 2027, Renstra Tahun 2025-2029 serta Manajemen Risiko Tahun 2026.
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja berupa Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 15 laporan evaluasi kinerja (Evaluasi Kinerja Triwulan

IV Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026, Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026, Evaluasi Kinerja Tribulan III Tahun 2026, LKjIP, LPPD, LKPJ, Evaluasi Manajemen Risiko, Evaluasi RKPD Tribulan IV Tahun 2025, Evaluasi RKPD Tribulan I Tahun 2026, Evaluasi RKPD TribulanII Tahun 2026, Evaluasi RKPD Tribulan III Tahun 2026, Evaluasi SAKIP, Laporan RB Tema, Laporan Pelaksanaan Musrenbang).

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase kecukupan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 3.078.074.040,00 melalui 2 sub kegiatan:

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 30 orang/bulan selama 1 tahun dengan anggaran Rp. 3.062.174.040,00.

1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, indikator kinerja jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan output 200 dokumen SPM (Surat Perintah Membayar), kegiatan ini berisi pembayaran honorarium pengurus barang dan penanggung jawab keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 15.900.000.

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran dengan dengan anggaran Rp. 539.286.140,00 terdiri 6 Sub Kegiatan yaitu:

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, indikator kinerja Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 5 paket belanja alat listrik dengan anggaran sebesar Rp. 10.014.300,00.

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 5 paket yaitu alat untuk belanja tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer serta biaya

sewa kendaraan dinas pejabat eselon II dengan anggaran sebesar Rp. 187.020.340,00.

1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 4 paket yaitu belanja barang habis pakai (isi tabung gas), perabot kantor, Alat/Bahan kantor lainnya serta bahan natura dengan anggaran sebesar Rp. 12.421.700,00.

1.3.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket bahan cetak dengan anggaran Rp. 4.999.800,00.

1.3.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu, indikator kinerja Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 6 laporan dengan anggaran Rp. 24.870.000,00 meliputi komponen belanja makanan dan minuman rapat, serta belanja makanan dan minuman jamuan tamu.

1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 150 laporan perjalanan dinas serta penyediaan makanan dan minuman untuk rapat, dengan anggaran sebesar Rp. 299.960.000,00.

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik, alokasi anggaran sebesar Rp. 72.272.000,00 melalui sub kegiatan:

1.4.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya melalui indikator Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan yaitu belanja alat rumah tangga/mebel sebanyak 40 unit.

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kinerja Persentase kecukupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 443.131.224,00 melalui 3 sub kegiatan yaitu:

- 1.5.1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan untuk belanja tagihan telepon dan listrik kantor dengan anggaran sebesar Rp. 26.320.000,00.
- 1.5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan untuk pemeliharaan komputer dan printer kantor dengan anggaran Rp. 24.260.000,00, dan
- 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan untuk pembayaran kebutuhan honorarium 13 orang Non ASN BPBD selama 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 392.551.224,00.
- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kinerja Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik, alokasi anggaran sebesar Rp. 256.455.686,00 dengan 4 sub kegiatan yaitu:
 - 1.6.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 31 unit kendaraan dinas operasional, kegiatan ini untuk belanja BBM, suku Cadang, dan belanja pengurusan pajak kendaraan dinas/operasional selama satu tahun dengan anggaran sebesar Rp. 146.415.686,00.
 - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan indikator Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 16 unit alat kantor dengan anggaran Rp. 15.040.000,00.
 - 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, indikator kinerja Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit dengan anggaran Rp. 50.000.000,00, dan

- 1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit dan anggaran sebesar Rp.45.000.000,00.
2. Program Penanggulangan Bencana, indikator kinerja Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan penanggulangan bencana dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.101.586.300,00 terdiri dari 4 Kegiatan antara lain:
- 2.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, indikator kinerja Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan informasi rawan bencana dengan 1 sub kegiatan yaitu :
- 2.1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman bencana), indikator kinerja Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun yaitu kepada 35 orang/warga melalui kegiatan Sosialisasi Rawan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 20.120.500,00.
- 2.2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana indikator kinerja Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 580.514.700,00 dengan 5 sub kegiatan yaitu:
- 2.2.1. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, indikator kinerja Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya, sebanyak 42 unit dengan anggaran Rp. 101.142.000,00.
- 2.2.2. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, indikator kinerja Jumlah warga negara yang mengikuti gladi

kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota kepada 75 orang/warga di daerah rawan bencana dengan anggaran sebesar Rp.42.432.900,00.

2.2.3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, indikator kinerja Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sebanyak 6 kawasan dengan anggaran sebesar Rp. 408.937.400,00 melalui kegiatan pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana (DESTANA) 5 kawasan (Desa), kegiatan pembentukan Sekolah Aman Bencana (SPAB) pada 1 sekolah, serta Penyusunan Dokumen IKD.

2.2.4. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya, dengan target kinerja 1 Laporan (Laporan Tahunan Pusdalops PB), kegiatan penyediaan alat komunikasi (HT) dengan anggaran Rp. 5.375.400,00.

2.2.5. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yaitu melalui kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp. 22.627.000,00.

2.3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, indikator kinerja Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, alokasi anggaran sebesar Rp. 420.951.100,00 dengan 4 sub kegiatan yaitu:

- 2.3.1. Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat dengan target output 1 dokumen penetapan SK Tanggap Darurat bencana dengan anggaran sebesar Rp.14.985.000,00, yang berisi kegiatan operasional aktivitas lapangan penanganan darurat bencana.
- 2.3.2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota, indikator Kinerja Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana dengan target 10 orang korban bencana, melalui kegiatan operasional SAR dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00.
- 2.3.3. Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target output 300 orang penerima bantuan logistik dengan anggaran sebesar Rp.174.966.100,00 melalui kegiatan belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Stimulan Darurat Bencana serta Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- 2.3.4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota melalui belanja aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kekeringan dengan anggaran sebesar Rp. 216.000.000,00.
- 2.4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana indikator kinerja Persentase layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terselesaikan dengan 2 sub kegiatan yaitu:
 - 2.4.1. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana

di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan melalui output 1 kegiatan yaitu rapat dan perjalanan dinas dalam daerah serta luar daerah dalam rangka koordinasi penanganan pasca bencana dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00.

2.4.2. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota, indikator kinerja Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun dengan output 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00.

Rincian kegiatan beserta alokasi anggaran yang telah dijelaskan pada uraian diatas, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program / Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik		Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Kab.Blitar	100%		4.389.219.090,00
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang telah dikerjakan</i>	<i>Kab.Blitar</i>	<i>100%</i>		<i>0,00</i>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Blitar	4 dokumen	Renja Perubahan Tahun 2026, Renja Tahun 2027, Renstra Tahun 2025-2029 serta Manajemen Risiko Tahun 2026	0,00
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Blitar	15 dokumen	Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026, Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026, Evaluasi Kinerja Tribulan III Tahun 2026, LkjIP, LPPD, LKPJ, Evaluasi Manajemen Risiko, Evaluasi RKPD Tribulan IV Tahun 2025, Evaluasi RKPD Tribulan I Tahun 2026, Evaluasi RKPD TribulanII Tahun 2026, Evaluasi RKPD Tribulan III Tahun 2026, Evaluasi SAKIP, Laporan RB Tema, Laporan Pelaksanaan Musrenbang	0,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik		Anggaran (Rp)
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kecukupan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab.Blitar	100%		3.078.074.040,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Blitar	30 orang/bulan	30 orang ASN	3.062.174.040,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Blitar	200 dokumen	Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar)	15.900.000,00
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran	Kab.Blitar	100%		539.286.140,00
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Blitar	5 paket	belanja alat listrik	10.014.300,00
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Blitar	5 paket	belanja tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer serta biaya sewa kendaraan dinas pejabat eselon II	187.020.340,00
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab.Blitar	4 paket	belanja barang habis pakai (isi tabung gas), perabot kantor, Alat/Bahan kantor lainnya serta bahan natura	12.421.700,00
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Blitar	1 paket	bahan cetak	4.999.800,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik		Anggaran (Rp)
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab.Blitar	6 laporan	belanja makanan dan minuman rapat, serta belanja makanan dan minuman jamuan tamu	24.870.000,00
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Blitar	150 laporan	Biaya perjalanan dinas serta penyediaan makanan dan minuman untuk rapat	299.960.000,00
1.4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik</i>	<i>Kab.Blitar</i>	<i>100%</i>		<i>72.272.000,00</i>
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab.Blitar	40 unit	belanja alat rumah tangga/mebel (Kursi dan Meja kerja)	72.272.000,00
1.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kab.Blitar</i>	<i>100%</i>		<i>443.131.224,00</i>
1.51.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Blitar	12 laporan	belanja tagihan telepon dan listrik kantor	26.320.000,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Blitar	12 laporan	pemeliharaan komputer dan printer kantor	24.260.000,00
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Blitar	12 laporan	honorarium 13 orang Non ASN BPBD	392.551.224,00
1.6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik</i>	<i>Kab.Blitar</i>	<i>100%</i>		<i>256.455.686,00</i>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Blitar	31 unit	belanja BBM , suku Cadang, dan belanja pengurusan pajak kendaraan dinas/operasional	146.415.686,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik		Anggaran (Rp)
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Blitar	16 unit	Pemeliharaan alat kantor (AC dan Chain Saw)	15.040.000,00
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab.Blitar	1 unit	Pemeliharaan gedung kantor	50.000.000,00
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab.Blitar	1 unit	Pemeliharaan halaman Gedung kantor	45.000.000,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan penanggulangan bencana	Kab.Blitar	100%		1.101.586.300,00
2.1	<i>Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana</i>	<i>Kab.Blitar</i>	<i>100%</i>		<i>20.120.500,00</i>
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab.Blitar	35 orang	Sosialisasi Rawan Bencana	20.120.500,00
2.2	<i>Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan</i>	<i>Kab.Blitar</i>	<i>100%</i>		<i>580.514.700,00</i>
2.2.1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab.Blitar	42 unit	Belanja perlengkapan dinas lapangan	101.142.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik	Anggaran (Rp)	
2.2.2	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	75 orang	Galdi kesiapsiagaan terhadap bencana di wilayah rawan bencana	42.432.900,00
2.2.3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab.Blitar	6 kawasan	kegiatan pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana (DESTANA) 5 kawasan (Desa), kegiatan pembentukan Sekolah Aman Bencana (SPAB) pada 1 sekolah, serta Penyusunan Dokumen IKD.	408.937.400,00
2.2.4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab.Blitar	1 laporan	Penyediaan alat komunikasi (HT)	5.375.400,00
2.2.5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab.Blitar	1 kawasan	pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum	22.627.000,00
2.3	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana</i>	<i>Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</i>	<i>Kab.Blitar</i>	<i>100%</i>		<i>420.951.100,00</i>

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik		Anggaran (Rp)
2.3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab.Blitar	1 dokumen	SK Tanggap Darurat	14.985.000,00
2.3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab.Blitar	10 orang	Korban bencana	15.000.000,00
2.3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Blitar	300 orang	Penerima logistik korban bencana	174.966.100,00
2.3.4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	1 laporan	Laporan aktivasi pos komando penanganan darurat bencana kekeringan	216.000.000,00
2.4	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	Persentase layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terselesaikan	<i>Kab.Blitar</i>	<i>100%</i>		<i>80.000.000,00</i>
2.4.1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab.Blitar	1 kegiatan	Laporan rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	30.000.000,00
2.4.2	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab.Blitar	2 dokumen	Dokumen JITUPASNA	50.000.000,00
JUMLAH						5.490.805.390,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan upaya pelengkap sekaligus penajaman terhadap sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, serta selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026. Dokumen rencana kerja ini juga memberikan gambaran mengenai target pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, yang pengukurannya didasarkan pada indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan program, baik pada tahun berjalan maupun mengacu pada capaian tahun-tahun sebelumnya, dengan tetap berpedoman pada program serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana kerja BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2026 mencakup 2 program yang terdiri dari 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan, faktor keberhasilan ditentukan oleh ketepatan perencanaan, keterpaduan pelaksanaan, serta konsistensi evaluasi secara berkelanjutan.

Rencana kerja ini mencerminkan komitmen BPBD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara efektif dan efisien, sekaligus memberikan arah dan prioritas kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, serta penanganan bencana di wilayah Kabupaten Blitar. Melalui dokumen Renja ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara sinergis, terukur, dan berkesinambungan, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang aman, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Tahun 2026, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menghadapi kemungkinan ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dan kebutuhan yang telah direncanakan, antara lain:

- a. *Pelaksanaan program dan kegiatan* perlu dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan bencana di Kabupaten Blitar.
 - b. *Apabila ketersediaan anggaran tidak sejalan dengan kebutuhan*, maka perlu dilakukan penyesuaian melalui penetapan skala prioritas, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, serta pencarian dukungan pendanaan alternatif melalui sinergi dengan pemerintah provinsi, pusat, maupun kemitraan dengan pihak lain.
 - c. *Monitoring dan evaluasi* harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan agar arah pelaksanaan program tetap sesuai rencana, serta dapat dilakukan langkah korektif apabila ditemui kendala di lapangan.
 - d. *Sinergi dan kolaborasi* dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan, sehingga keterbatasan anggaran maupun sumber daya dapat diantisipasi melalui kerja sama yang lebih luas dan terpadu.
2. Dalam rangka menjamin agar Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka pelaksanaannya perlu berpedoman pada kaidah-kaidah berikut:
- a. *Keterpaduan Perencanaan*, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan harus selaras dengan arah kebijakan Renstra BPBD Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026, serta kebijakan pemerintah provinsi dan pusat di bidang penanggulangan bencana.
 - b. *Efektivitas dan Efisiensi*, pelaksanaan program dan kegiatan wajib mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat anggaran, dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien serta berorientasi pada hasil.
 - c. *Akuntabilitas dan Transparansi*, setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan anggaran maupun hasil kegiatan.
 - d. *Prioritas dan Skala Kebutuhan*, dalam kondisi keterbatasan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan harus didasarkan pada penentuan skala prioritas yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat serta mendukung tujuan penanggulangan bencana.

- e. *Monitoring dan Evaluasi*, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan dan penyempurnaan program di masa mendatang.
- f. *Kolaborasi dan Partisipasi*, pelaksanaan Renja harus mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga terkait lainnya dalam upaya penanggulangan bencana.

3. Rencana tindak lanjut

Agar pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2026 dapat berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Internal, menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan ke dalam rencana kerja tahunan perangkat daerah yang lebih operasional, lengkap dengan penjadwalan, target, dan penanggung jawab.
- b. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran, langkah penyesuaian dilakukan melalui penetapan skala prioritas program, rasionalisasi kegiatan yang kurang mendesak, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
- c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, mekanisme pelaporan berkala, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Blitar, 21 Agustus 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar



IVONG BERTTYANTO, S.T, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730518 199901 1 001